

BAB 3

GAMBARAN UMUM OBYEK STUDI

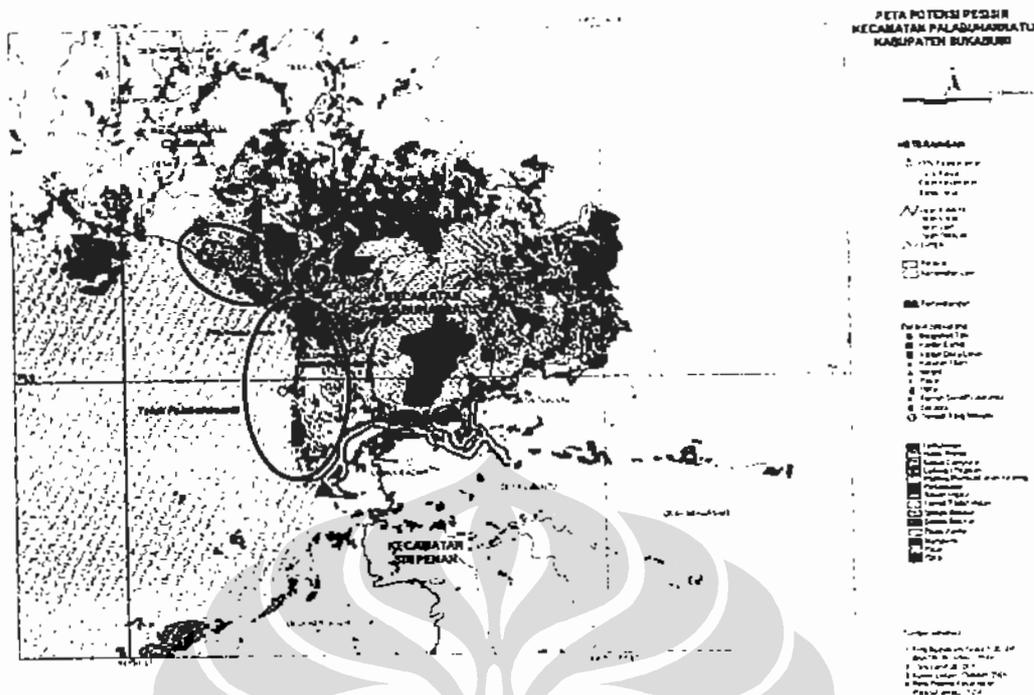
3.1 Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Palabuhan Ratu

Palabuhanratu adalah salah satu wilayah pesisir yang strategis di bagian selatan Pulau Jawa. Dengan posisi geografis di $106^{\circ}29'6''$ – $106^{\circ}34'30''$ bujur timur dan $6^{\circ}57'18''$ – $7^{\circ}36'$ lintang selatan. Palabuhanratu merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Sukabumi. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikakak, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikidang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantargadung, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kecamatan Palabuhanratu adalah 10.287,91 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 89.313 jiwa. Kecamatan Palabuhanratu dibagi dalam 8 desa, yaitu Citarik, Palabuhanratu, Citepus, Cibodas, Buniwangi, Cikadu, Pasirsuren dan Tonjong.

Kecamatan Palabuhanratu menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2001. Oleh karena itu, Palabuhanratu telah menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Jarak antara Palabuhanratu dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, Bandung, sejauh 123 km, dengan waktu tempuh 5 jam.

Hasil alam Palabuhanratu, terutama dari sektor perikanan tidak hanya dikonsumsi penduduk lokal. Distribusi hasil laut yang diperdagangkan di kecamatan ini meliputi wilayah dalam dan luar negeri. Kota terpenting dalam hubungan dagang ini adalah Jakarta, yang berjarak tempuh sekitar 140 Km, dengan waktu tempuh 5 hingga 6 jam.



Gambar 3.2. Peta Kecamatan Palabuhanratu

Sumber: DKP Kabupaten Sukabumi, Potensi Perikanan Sukabumi 2007

Kecamatan Palabuhanratu memiliki dua desa atau kelurahan yang masuk dalam kategori daerah pantai. Peta diatas menggambarkan lokasi dari kedua desa tersebut. Lingkaran nomor 1 adalah Desa Citepus, lingkaran nomor 2 adalah Desa Palabuhanratu. Meski berhadapan langsung dengan Pantai, struktur daratan di Kecamatan Palabuhanratu cukup beragam. Karakteristik tanah di kecamatan Palabuhanratu juga cukup subur untuk ditanami padi dan perkebunan.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Kemampuan Tanah (Ketinggian) Palabuhanratu
Tahun 2006

Ketinggian (meter dpl)	Luas Wilayah (kilometer persegi)
0-25	556,75
25-100	1.854,50
100-500	5.562,32
500-1000	2.134,34
>1000	-
Total	10.287,91

Palabuhanratu juga memiliki karakteristik tanah yang beragam. Sebagian tanahnya cukup subur untuk menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Dengan beragam karakteristik tanah tersebut, pemanfaatan sumber daya alam di Palabuhanratu meliputi perikanan, pertanian dan perkebunan.

3.1.1 Pertanian dan Perkebunan

Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi ditopang oleh sektor pertanian. Sistem pengairan yang dipakai di Kab. Sukabumi masih menggunakan sistem irigasi non PU. Sekitar 23.538 ha sistem pengairan melalui irigasi non PU dan 18.402 ha tadah hujan, sisanya adalah sistem irigasi lainnya. Lahan tanah kering di Kab. Sukabumi, sebagian besar digunakan untuk hutan negara yaitu sekitar 77.400 ha, disusul perkebunan sekitar 67.743 ha dan tegal/kebun 61.750 ha

Dengan beragam karakteristik tanah yang cukup luas seperti tertera pada tabel diatas, pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian dan perkebunan cukup terbuka di Palabuhan ratu. Menurut catatan BPS Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Palabuhanratu memiliki produktifitas yang cukup baik dalam pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan. Beberapa catatan produksi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2. Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Palabuhanratu 2006

Jenis Lahan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
Padi Sawah	3.179	14.605
Padi Gogo	2.310	7.119
Karet	853	474,47
Kelapa	996	1.098,93
Kelapa Hibrida	8	4,88
Teh	86	37,97
Cengkeh	592,5	86,1

Data-data di atas menunjukkan bahwa penduduk di Palabuhanratu tidak semuanya bergantung pada sektor perikanan. Ladang padi dan perkebunan kelapa yang cukup luas berlokasi di Desa Citepus. Di desa tersebut, banyak terdapat penduduk Kecamatan Palabuhanratu yang berprofesi di sektor pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, lahan-lahan tersebut bukan milik warga lokal. Mereka hanya menyewa lahan untuk di garap, atau menjadi buruh tanih dan perkebunan. Akibatnya, mereka tidak melihat bekerja sebagai petani di sawah atau perkebunan sebagai alternatif profesi yang menjanjikan.

3.1.2 Perikanan

Posisi yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi salah satu sentra perikanan di Pulau Jawa. Bagi Kabupaten Sukabumi, dan khususnya bagi Kecamatan Palabuhanratu untuk memajukan sektor perikanan.

Di tingkat Kabupaten, jumlah rumah tangga perikanan darat yang terbanyak adalah rumah tangga perikanan yang mengusahakan ikan di kolam yang berjumlah 14.825 rumah tangga, kemudian di areal sawah sebanyak 3.266 rumah tangga. Jumlah ikan yang dilelang di TPI mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 8.736,72 ton pada tahun 2005 meningkat menjadi 96.227,96 ton pada tahun 2006 ini.

Palabuhanratu sendiri merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan terbanyak kedua di Sukabumi. Jumlah keluarga perikanan laut Palabuhanratu adalah 360 keluarga, dengan rincian usaha seperti tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Jenis Usaha Tahun 2006

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Perahu Tanpa Motor	23
2	Motor Tempel	261
3	Kapal Motor	76
Jumlah		360

Desa yang paling padat dengan keluarga perikanan adalah Desa Palabuhanratu. Desa ini memiliki beberapa RW atau kampung yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Berdasarkan hasil survey di Desa Palabuhanratu, tingkat pendidikan warga relatif rendah.

Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan Warga Desa Palabuhanratu

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persen	Persen Kumulatif
Tidak Sekolah	5	8%	8%
SD	34	54,80%	62%
SMP	7	11,29%	74%
SMU	13	20,97%	95%
D2/D3	1	1,61%	97%
S1	2	3,22%	100%
Total	62	100	

Tabel di atas menunjukkan lebih dari separuh warga hanya menamatkan pendidikan dasar hingga tingkat SD saja (62%). Rendahnya tingkat pendidikan warga desa berdampak pada tingkat ekonomi mereka. Dengan latar belakang pendidikan seperti itu, mereka tidak memiliki banyak pilihan profesi. Untuk bekerja di sektor formal, seperti menjadi pegawai atau buruh pabrik membutuhkan syarat ijazah. Syarat inilah yang menghambat mereka, sehingga banyak warga yang terserap di sektor informal, terutama sektor perikanan.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi hambatan bagi mereka untuk mengalami mobilisasi sosial vertikal. Mayoritas responden juga menyadari hambatan tersebut. Hal ini tercermin dari pilihan responden ketika ditanyakan mengenai urutan lapangan kerja yang paling mereka harapkan.

Tabel 3.5. Peringkat Harapan Lapangan Kerja Warga Desa Palabuhanratu dan Desa Pangsurlio

Peringkat	Harapan Lapangan Kerja	Rata-Rata Peringkat
1	Ekspor-impor atau perdagangan ikan dan hasil laut	3,418182
2	Pabrik	3,263636
3	Pengembangan pariwisata	2,854545
4	pertanian dan perkebunan	2,8
5	Jasa	2,663636

Tabel di atas menunjukkan sektor perikanan adalah lapangan kerja yang paling diharapkan warga. Mereka berharap agar pemerintah bisa memajukan sektor perikanan di Palabuhanratu sehingga taraf hidup masyarakat bisa ikut terangkat. Profesi di sektor perikanan memang tidak banyak menuntut tingkat pendidikan yang tinggi. Warga bisa menjadi nelayan tangkap, pengolah hasil tangkap, pedagang, atau profesi terkait lainnya, selama mereka memiliki keahlian di bidang tersebut.

Salah satu aset kecamatan yang memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan kecamatan Palabuhanratu maupun Sukabumi adalah keberadaan pelabuhan perikanan, yang bernama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Pelabuhan ini dirancang untuk dapat melayani kapal-kapal perikanan yang berukuran hingga lebih dari 60GT yang beroperasi di perairan Nusantara dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pelabuhan ini menjalankan fungsi operasional pelabuhan perikanan lainnya. Kegiatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kegiatan operasional di laut, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penangkapan ikan di laut (*fishing ground*),
 - b. Pendaratan di dermaga bongkar (*landing*),
 - c. Pelayanan di dermaga muat (*servicing*),
 - d. Perawatan dan perbaikan (*maintenance and repairs*),
 - e. Tembat labuh dan istirahat (*berthing*).
2. Kegiatan operasional di darat, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelelangan (*auctioning*),

- b. Penyortiran dan pengepakan (*sorting & packing*),
- c. Pengolahan (*processing*),
- d. Pengangkutan (*transportation*),
- e. Pemasaran (*marketing*)

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memiliki nilai tingkat konsistensi produksi ikan hasil tangkap yang cukup baik. Sejak tahun 1995 hingga tahun 2000, tingkat fluktuasi hasil tangkap bernilai positif sebesar 8,20%. Artinya, dari waktu-ke waktu pemanfaatan potensi sumber daya ikan terus meningkat. Untuk rincian produksi dan nilai ekonominya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.6. Kondisi Indeks Relatif Nilai Produksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 1995-2000

TAHUN	PPN PALABUHANRATU		KAB. SUKABUMI		Nilai (I)	FLUK-TUASI
	PRODUKSI (TON)	NILAI (RP)	PRODUKSI (TON)	NILAI (RP)		
1995	3.521,75	12.273.827.013	7.742,60	26.479.692.000	1,02	-
1996	3.386,38	11.572.500.701	8.543,40	29.218.428.000	1,00	-1,94%
1997	4.134,87	12.473.374.534	10.497,46	34.011.770.000	0,93	-6,82%
1998	2.381,97	12.826.537.199	8.692,65	29.728.863.000	1,57	69,11%
1999	2.765,50	19.678.882.762	10.460,40	35.777.865.000	2,08	32,13%
2000	2.515,01	12.713.421.300	4.353,00	21.791.572.500	1,01	-51,46%
RATA-2	3.156.120	13.589.757.251	8.381,59	29.501.365.083	1,27	8,20%

Sumber : PPNP dan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi

Catatan dari data tersebut adalah bahwa tidak semua kontribusi produksi perikanan berasal dari nelayan lokal. Hasil tangkap yang tercatat dalam transaksi di PPNP juga bisa berasal dari nelayan migran. Meski tidak diperoleh data spesifik tentang hal ini, tetapi perbandingan ukuran kapal yang berlabuh di PPNP setidaknya bisa memberikan gambaran.

Jenis armada penangkapan ikan yang dioperasikan di PPN Palabuhanratu adalah jenis Kapal Motor (<10 GT - >30 GT) dan Jenis Perahu Motor Tempel dengan alat tangkap rampus, pancing, payang, gill net, bagan, rawai dan purse seine. Jumlah Perahu Motor Tempel dan Kapal Motor yang beroperasi disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Jumlah Motor Tempel dan Kapal Motor setelah PPN Palabuhanratu
Dioperasionalkan tahun 1993 – 2000

NO	Tahun	Jenis Kapal/Perahu Perikanan (Unit)					Jumlah (Unit)	Fluktuasi
		Motor Tempel	Kapal Motor (GT)					
			< 10	11- 20	21- 30	> 30		
1	1993	342	42	9	14	13	420	-
2	1994	344	40	23	22	16	445	5.95%
3	1995	352	37	40	17	15	461	3.60%
4	1996	365	51	30	30	12	488	5.86%
5	1997	290	60	30	14	12	406	-16.80%
6	1998	275	112	13	12	9	421	3.69%
7	1999	278	145	13	12	11	459	9.03%
8	2000	235	147	11	12	11	416	-9.37%
RATA - RATA KENAIKAN								0.28%

Sumber : PPNP

Palabuhanratu didominasi oleh jenis Motor Tempel. Karena Motor Tempel memiliki daya jelajah jaraknya pendek, maka bisa dipastikan alat tangkap tersebut dimiliki nelayan lokal. Meski demikian, bukan berarti seluruh Kapal Motor dimiliki oleh nelayan dari daerah lain (nelayan migran). Ramainya seluruh motor dan kapal motor yang ada, produktifitas Palabuhanratu juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.8. Produktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu

Tahun	Produksi (kg)	Upaya (Unit)	Prioduktivitas	Fluktuasi
1993*)	3.118.782	420	7.425,67	-
1994	3.424.725	445	7.696,01	3,64%
1995	3.521.745	461	7.639,36	-0,74%
1996	3.386.376	488	6.939,30	-9,16%
1997	4.134.871	406	10.184,41	46,76%
1998	2.381.967	421	5.657,88	-44,45%
1999	2.765.495	459	6.025,04	6,49%
2000	2.515.002	416	6.045,68	0,34%
RATA-RATA	3.156.120	440	7.139,14	0,36%

Sumber : PPNP. Keterangan : *) data mulai bulan Maret 1993,

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa dilihat aspek produktivitas kapal perikanan sejak sejak 1995 hingga tahun 2000 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, secara umum mengalami peningkatan sebesar 0,36%. Tabel diatas juga menunjukkan pentingnya produktifitas perikanan Palabuhanratu bagi Kabupaten Sukabumi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Palabuhanratu merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi, maupun di sepanjang garis Pantai Selatan pada umumnya.

3.2 Sosial Ekonomi Masyarakat Palababuhanratu

3.2.1 Dinamika Umum Kecamatan Palabuhanratu

Palabuhanratu menjadi salah satu kecamatan terpenting di Kabupaten Sukabumi. Sejak tahun 2001, pusat pemerintahan Sukabumi telah berpindah ke Palabuhanratu. Di kecamatan ini terdapat beberapa kantor pemerintahan penting, yaitu Pemda, Sekda, Bappeda, Dinas Perhubungan Laut dan Sekda. Akan tetapi, peran strategis sebagai pusat pemerintahan belum memberi manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan penduduk.

Tabel 3.9. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan di Palabuhanratu Tahun 2006

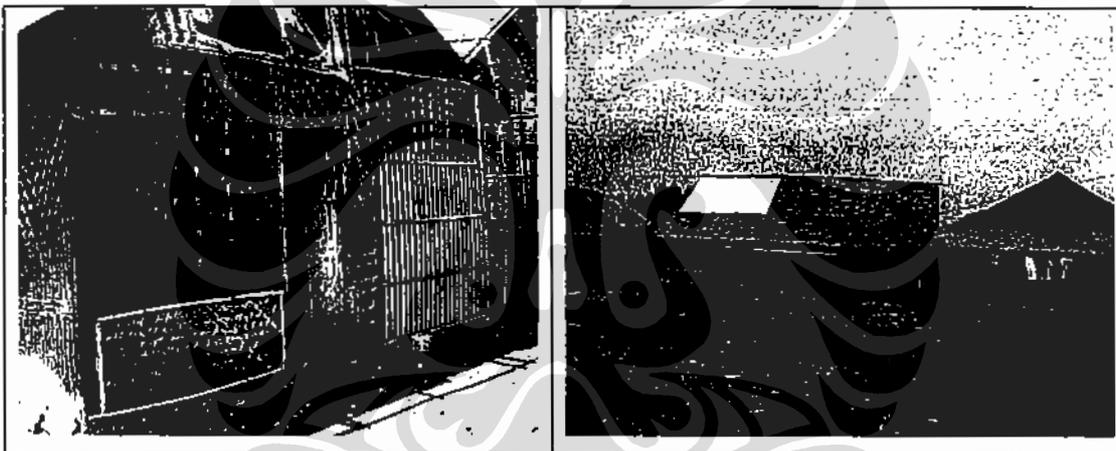
Tingkat Pendidikan	Sukabumi	Palabuhanratu
Tidak Tamat SD	133.056	1.437
Tamat SD-SLTP	398.987	17.891
Tamat SLTA ke Atas	92.013	4.126
Jumlah	623.509	23.454

Tingkat pendidikan penduduk di Palabuhanratu masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan kepala keluarga, seperti tertera pada tabel diatas. Sebagian besar kepala keluarga merupakan lulusan SD hingga SLTP. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, dapat di perkirakan bahwa lebih banyak penduduk yang bekerja sebagai pekerja di sektor nonformal, ketimbang sektor formal.

Tabel 3.10. Pentahapan Keluarga Sejahtera di Palabuhanratu Tahun 2006

Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus
Sukabumi	126.560	162.595	219.688	91.783	22.883
Palabuhanratu	3.994	4.367	9.340	4.547	1.206

Tingkat pendidikan kepala keluarga di Palabuhanratu sejalan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Mayoritas keluarga berada pada level sejahtera II ke bawah. Jumlah penduduk pra sejahtera juga masih relatif tinggi, yaitu 17% dari total keluarga di Palabuhanratu. Dengan demikian kesejahteraan penduduk di Kecamatan Palabuhanratu di dominasi oleh strata menengah, dengan UMK Kabupaten sebesar Rp 450.000.



Gambar 3. 3. Beberapa Rumah Semi Permanen Nelayan di Kampung Cemara, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu

Meskipun pelabuhan ratu memiliki salah satu pelabuhan perikanan paling sibuk di garis pantai selatan Jawa, mata pencaharian penduduk relatif beragam. Setidaknya ada tiga jenis profesi yang digeluti oleh warga strata bawah (yang diproyeksikan menjadi sasaran program pemberdayaan) di Palabuhanratu. Profesi yang pertama adalah sebagai buruh migran Tenaga Kerja Wanita. Jumlahnya ada 451 dengan Saudi Arabia sebagai negara paling diminati, yang pada tahun 2006 mencapai 404 TKW. Di Sukabumi sendiri, lapangan kerja sebagai TKW cukup

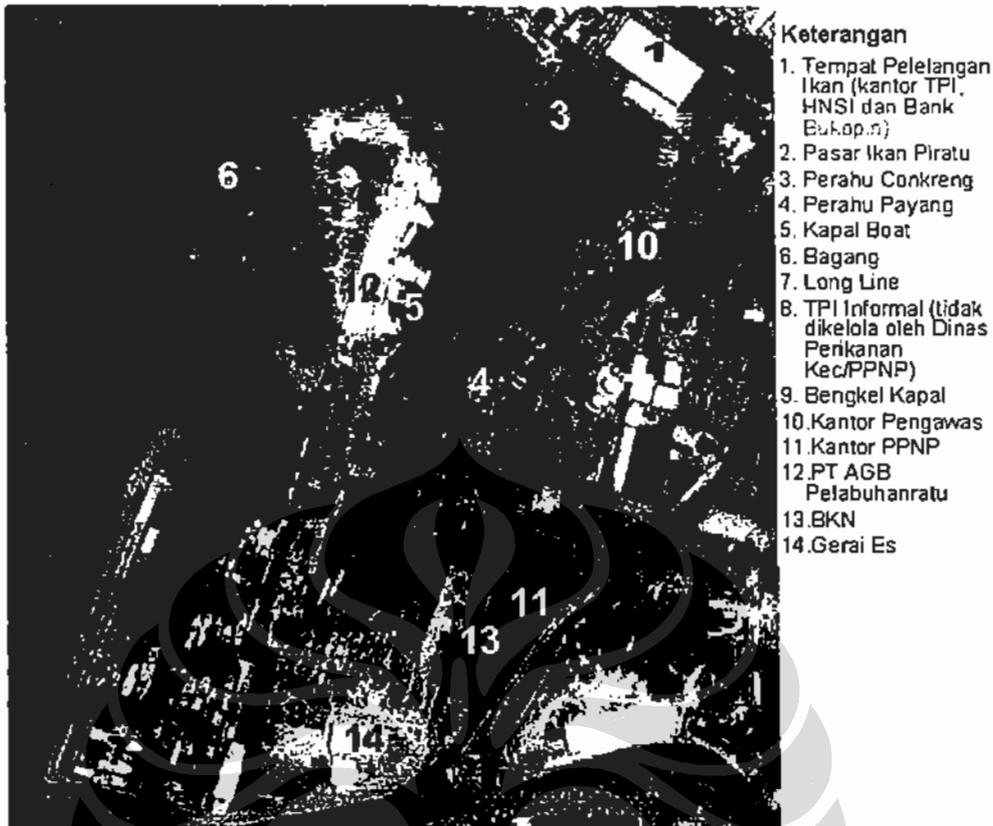
besar menyedot tenaga kerja. Pada tahun 2006, jumlahnya telah mencapai 18.625, dengan negara tujuan favorit Saudi Arabia, yang mencapai 15.272 TKW.

Kelompok profesi kedua adalah warga yang bekerja sebagai petani. Jumlah kelompok tani di Palabuhanratu ada 34 kelompok, dengan total anggota sebanyak 912 orang. Dan kelompok profesi ketiga adalah warga yang bekerja di sektor perikanan. Jumlah rumah tangga perikanan yang bekerja di Palabuhanratu berjumlah 360 keluarga (BPS Kab. Sukabumi Dalam Angka: 2006).

3.2.2 Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Palabuhanratu

Berdasarkan batasan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan, Palabuhanratu memiliki dua desa kelurahan yang masuk dalam kategori daerah pantai, yaitu Desa Citepus dan Desa Palabuhanratu. Mata pencaharian utama di kedua desa ini adalah sebagai nelayan atau profesi lain yang berhubungan dengan wilayah pesisir.

Kegiatan sosial ekonomi yang berkaitan dengan sektor perikanan berpusat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Di dalam PPNP semua warga yang bergerak di bidang perikanan berkumpul dan berinteraksi. Di dalamnya tidak hanya terjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan sosial yang menunjang keteraturan pola interaksi komunitas pesisir Palabuhanratu.



Gambar 3. 4. Peta Sosial Palabuhanratu Nusantara

Sumber: Google Earth 2008

Palabuhanratu Perikanan Nusantara Palabuhanratu sendiri memiliki berbagai fasilitas untuk nelayan. Pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program Unit Bisnis Perikanan Terpadu dari Departemen Perikanan dan Kelautan. Program tersebut berupaya memberikan fasilitas yang bisa mengurangi pengeluaran nelayan sekaligus juga meningkatkan pendapatan mereka. Selain areal yang luas untuk menambatkan kapal, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga berada di dalam PPNP. Otoritas PPNP juga berhasil mengundang dua investor luar, satu asing yakni PT AGB Palabuhanratu (Korea) dan PT URI yang dikelola investor asal Jakarta. Kedua investor tersebut diundang sebagai upaya mendekatkan nelayan dengan pasar. Kedua perusahaan tersebut memang membeli ikan untuk diekspor atau diolah lalu diekspor. Fasilitas berikutnya adalah akses ke perbankan melalui Bank Bukopin. Kehadiran Bank tersebut diharapkan

dapat membantu pemodal koperasi. Sayangnya syarat agunan seringkali menjadi hambatan bagi nelayan untuk memperoleh kredit. Sebaliknya, bank sendiri memiliki kepercayaan yang lemah pada kemampuan nelayan untuk melunasi kredit karena penghasilannya yang fluktuatif.



Gambar 3.5. PT URI di Jalan Pelita, Desa Rawa Kalong



Gambar 3.6. PT AGB Palabuhanratu di dalam lokasi PPNP

Kompleksitas akan terlihat pada kehidupan komunitas pesisir bila dipotret dari pola interaksi yang terjadi di PPNP. Dari sudut pandang hukum, pengelola PPNP maupun TPI adalah aktor yang paling berkuasa, sebab mereka mewakili unsur pemerintah. Akan tetapi, dalam sudut pandang *multiple center of power* (Joaquin L. Gonzalez, 2000) kekuasaan tidak terpusat pada satu kelompok, melainkan menyebar. Sebagaimana pada komunitas pesisir pada umumnya, para pemilik modal, atau biasa disebut dengan bakul, memiliki peranan strategis bagi komunitas pesisir.

Bila jajaran birokrat memiliki kewenangan yang diperoleh atas dasar hukum (otoritas formal), para bakul ini memiliki basis otoritas yang terkadang lebih berpengaruh, yakni modal ekonomi. Para bakul berperan sebagai pembeli dan sekaligus pemodal bagi nelayan untuk melaut. Sebagian dari mereka juga memiliki beberapa kapal tangkap ikan. Dengan modal ekonomi yang mereka miliki, serta penguasaan pada akses pemasaran, mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual hasil tangkap nelayan.

Menurut keterangan warga, ikan yang dijual di pasar atau di TPI bukan lagi dijual oleh tangan pertama. Mereka adalah tangan kedua atau ketiga yang terlebih dahulu sudah membeli dagangannya langsung dari nelayan. Dengan demikian, fungsi TPI sebagai tempat penjualan ikan tidak berfungsi maksimal. Oleh karena itu wajar bila nelayan-nelayan lokal memiliki satu lokasi lelang yang menjadi tempat mereka menjual hasil tangkap (gambar peta, bangunan nomor 8) langsung ke konsumen, tanpa melalui perantara bakul. Di sana baik nelayan maupun konsumen bisa mendapat harga tawar yang lebih baik.

Berikutnya yang memiliki kuasa strategis di sekitar pelabuhan adalah pemilik-pemilik kapal (*taweuh*) dan DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Umumnya nelayan melaut dengan berkelompok. Dan pemilik perahu biasanya menjadi ketua kelompoknya. Beberapa orang bahkan bisa memiliki lebih dari satu perahu. Dari sinilah biasanya kelompok nelayan terbentuk, alternatif lainnya memang kerjasama antar pemilik kapal. Mereka berkelompok untuk meringankan biaya tanggungan ongkos melaut. Sebab, sekali melaut modal yang dibutuhkan memang cukup besar. Untuk satu kapal sampan (*congkrenng*), sehari minimal butuh modal Rp 50.000,-. Sementara untuk kapal payang atau *purse seine* minimal Rp 500.000,- hingga Rp 3.000.000,-.

Keberadaan HNSI sebagai wadah aspirasi nelayan. HNSI membela nelayan untuk bisa membeli bensin dengan dirjen dan mendapatkan minyak tanah. Sebagai wadah nelayan, HNSI memiliki jaringan yang cukup luas. Karena itu pengurus HNSI menjadi pengurus koperasi LEPM2R, koperasi yang mengelola Dana Ekonomi Produktif program PEMP dari DKP Kab. Sukabumi.

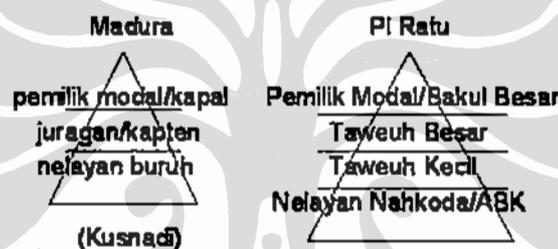
3.2.3 Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Menurut Kusnadi (2007: 63), desa nelayan adalah desa yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya diperoleh dengan mencari ikan di laut. Di desa tersebut, profesi nelayan dan produksi dari sektor perikanan laut yang dihasilkan desa nelayan menentukan kehadiran sektor pekerjaan lain, atau institusi ekonomi lokal, seperti industri perkapalan atau pembuatan perahu nelayan, pengolahan hasil tangkap, atau pembuatan alat-alat tangkap, jasa pengangkutan dan perbengkelan, serta toko yang menjual berbagai kebutuhan nelayan, baik

kebutuhan operasional atau kebutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, produktifitas sektor perikanan sangat menentukan eksistensi desa tersebut.

Dalam desa nelayan tersebut ada pemilik modal, nahkoda dan nelayan buruh yang menjadi mayoritas profesi. Karena itu, ketiga kelompok tersebut mewakili struktur sosial masing-masing. Kusnadi menyatakan demikian dalam penelitiannya pada masyarakat pesisir di Madura.

Komunitas pesisir Palabuhanratu pun memiliki kelompok-kelompok sosial yang hampir sama. Hanya saja, di Palabuhanratu, antara nahkoda dengan nelayan buruh tidak ada perbedaan status sosial dan ekonomi yang mencolok. Selain itu, pemilik kapal juga tidak selalu menjadi pemilik modal yang signifikan. Dengan demikian, struktur sosial di komunitas pesisir Palabuhanratu lebih kompleks ketimbang komunitas pesisir di Madura.



Gambar 3.7. Struktur Sosial Masyarakat Pesisir Palabuhanratu

Sumber: Kusnadi, 2007

Antara pemilik modal dengan *taweuh* maupun dengan nelayan terjadi hubungan timbal-balik berbasis kepentingan ekonomi. Para pemilik modal bisa memperoleh hasil tangkap dengan harga miring dengan meminjamkan modal yang tidak akan bisa dikembalikan oleh nelayan buruh. Dari sinilah hubungan tersebut terus berlanjut, dan struktur sosial komunitas pesisir terus bertahan.

3.2.4 Pemberdayaan Komunitas

Sebagai kota kecamatan terpenting di Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu memiliki program-program pemberdayaan yang cukup beragam. Program-program tersebut berasal dari inisiatif pemerintah, baik pusat, kabupaten,

maupun kecamatan. atau bisa juga dari masyarakat, maupun pengusaha. Akan tetapi, meski cukup banyak program yang ditawarkan, program tersebut umumnya bisa dibedakan menjadi dua kategori.

Kategori yang pertama adalah bantuan keuangan. Bantuan seperti ini bisa berupa hibah, seperti BLT dan raskin, atau bisa juga berupa kredit modal. Pelaksanaan program seperti ini umumnya dilakukan melalui koperasi yang dibina oleh pemerintah, seperti program PEMP. Kategori yang kedua adalah pembinaan lingkungan. Bentuk program seperti ini biasanya berupa pembangunan fasilitas umum penunjang. Program-program seperti ini dikelola melalui kecamatan bekerjasama dengan konsultan ahli, seperti pada program P2KP.

Tabel 3.11. Program Pemberdayaan/Layanan Sosial yang Pernah/Sedang Diterapkan

Pelaksana	Program di Lapangan
Dinas Kelautan Perikanan	PEMP Bantuan Alat Tangkap
Pemerintah Kecamatan	P2KP, PPK, dll
BUMN/D	Kredit Usaha Bersama (dana bergulir)
Masyarakat	Bantuan Alat Tangkap

Beragamnya program pemberdayaan maupun layanan sosial yang berjalan di Palabuhanratu menunjuknya banyaknya aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pemberdayaan warga Kecamatan Palabuhanratu. Meski demikian, sebuah upaya pemberdayaan komunitas tentunya tidak harus selalu berwujud program. Sebab pemberdayaan sendiri merupakan sebuah aktifitas sosial berupa interaksi yang ditujukan untuk melakukan transfer daya kepada komunitas sehingga posisi tawar mereka lebih kuat.

Tabel. 3.12. Peran Aktor-Aktor Dinamika Sosial Ekonomi di PPNP dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

No	Aktor	Kategori	Aktor di Lapangan	Bentuk Kontribusi
1	Pemerintah	Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • PPNP • TPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit bisnis perikanan terpadu • Pelelangan hasil tangkap
2	Pengusaha	Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> • PT AGB • Bakul Besar 	Pemasaran hasil tangkap dan modal
3	HNSI	Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi LEPM2R • HNSI 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan modal bergulir • Advokasi kepentingan nelayan
4	Perbankan	Pengusaha	Bank Bukopin	Modal
5	Taweuh	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kapal Kecil (congkeng & payang) • Kapal Besar (payang & longline) 	Modal dan penangkapan ikan/hasil laut lain
6	Nelayan	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Nahkoda • ABK 	Modal dan penangkapan ikan/hasil laut lain

Tabel di atas menggambarkan peran masing-masing aktor yang bekerja untuk memperkuat posisi masyarakat pesisir pada strata bawah. Berdasarkan aktifitas yang mereka lakukan, sangat kentara sekali bahwa upaya-upaya tersebut berbasis pada aktifitas ekonomi yang sangat kental. Hal ini bisa disebabkan karena dua hal. *Pertama*, ekonomi keluarga nelayan buruh maupun kelompok lain dalam masyarakat pesisir strata bawah memang sangat lemah. *Kedua*, aktor pemberdayaan sendiri memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi saat mereka 'memberdayakan' nelayan maupun kelompok sosial strata bawah di komunitas pesisir.

Strategi pemberdayaan seperti itu tentu saja memiliki kelemahan. Pelibatan warga dalam aktifitas ekonomi, tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan sama saja dengan mobilisasi warga mengikuti program pemberdayaan. Kelompok sasaran tetap tidak diberikan

kesempatan untuk menentukan layanan seperti apa yang mereka butuhkan. Program-program seperti ini tidak akan efektif bagi warga. Umumnya mereka justru terjat dalam ketergantungan, atau bersikap skeptis terhadap upaya tersebut.

3.3 Potensi dan Tantangan Pemberdayaan Komunitas Pesisir di Palabuhanratu

3.3.1 Analisis Situasi

Komunitas Pesisir di Kecamatan Palabuhanratu menghadapi permasalahan yang sama dengan komunitas-komunitas pesisir lain. meskipun Palabuhanratu memiliki potensi perikanan yang besar, tetapi potensi tersebut tidak bisa mereka maksimalkan karena adanya ketimpangan dalam dinamika sosial ekonomi sektor perikanan di sana. Baik nelayan maupun kelompok profesi lain yang berada dalam strata sosial bawah (terutama dari sisi ekonomi), berada dalam dominasi pemilik modal yang menguasai jalur pemasaran melalui 'suntikan' modal dan kartel harga beli hasil tangkap.

Para pemodal di Palabuhanratu mampu mempertahankan dominasinya dalam kegiatan sosial ekonomi perikanan, meski otoritas pemerintahan lokal telah mengundang masuknya investor ke dermaga, yakni PT AGB Palabuhanratu (Korea) dan PT URI (Jakarta). Kedua perusahaan yang bergerak di bidang ekspor ikan dan pengolahan ikan tersebut tidak bisa membeli ikan segar langsung dari nelayan. Mereka harus membelinya lewat perantara pedagang, yang tidak lain adalah para pengusaha lokal yang terlebih dahulu meminjamkan ongkos melaut bagi nelayan.

Nelayan-nelayan yang tidak mau atau tidak mampu mengikuti pola ekonomi seperti ini, akan tersingkir. Mereka adalah nelayan buruh. Mereka tidak berani terlibat utang-piutang dengan pemilik modal. Akibatnya, rantai ekonomi mereka hanya sampai pada penjualan hasil tangkap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa meminjam ke bank keliling (lintah darat), yang memberikan pinjaman dengan pengembalian harian, misalnya pinjaman Rp200.000 dengan pengembalian Rp3.000.000 per hari selama seratus hari.

Penduduk lokal di Kecamatan juga tidak memiliki banyak pilihan lapangan kerja. Tidak ada pabrik yang dekat dengan lokasi kecamatan. Kalaupun ada lapangan kerja seperti sektor pariwisata, dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap di sisi Tenggara Kecamatan Palabuhanratu, mayoritas komunitas pesisir yang hanya tamatan SD akan kesulitan untuk bersaing mengisi posisi di sana. Warga-warga yang tidak bisa bersaing tersebut akhirnya hanya bisa melaut. Bila punya modal lebih, mereka bisa membuka warung kelontong atau kredit motor untuk jasa ojek.

Di sisi lain, berbagai program bantuan dan pemberdayaan yang diperuntukkan bagi komunitas pesisir penerapannya masih jauh dari sempurna. Jangankan memenuhi kaidah-kaidah pemberdayaan seperti pengalihan kuasa melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pedoman pokok pelaksanaan program pun kerap dilanggar. Sebagai contoh, pengelola LEPM2R, koperasi yang dijalankan oleh warga dalam tahap institusionalisasi atau tahap ke-2 program PEMP, seringkali memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil atau besar secara langsung tanpa prosedur proposal. Semua itu dilakukan oleh LEPM2R untuk mengejar target pengguliran dan pengembalian modal dalam jangka setahun yang dikontrol oleh bank pelaksana.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah pada operasionalisasi bantuan untuk warga, baik melalui koperasi lokal ataupun perangkat desa seperti Rukun Warga. Berdasarkan hasil survei evaluasi model, mayoritas responden –dan berlaku di populasi– merasa tidak puas dengan alasan banyaknya penyelewengan oleh pengurus ataupun penyaluran yang salah sasaran.

Terlalu banyak kelompok oportunis yang mencoba mengambil keuntungan dari program-program yang sebenarnya diperuntukkan untuk membantu komunitas pesisir strata bawah. Akibatnya, kemitraan antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor privat (pengusaha) dan sektor ketiga (masyarakat sipil) tidak berjalan dengan baik. Sebab, masing-masing pihak ternyata lebih mementingkan kepentingan kelompok ketimbang saling bekerjasama. Dengan demikian, meski di Palabuhanratu gagasan mengenai *multy center of power* relevan, tetapi pusat-pusat kekuasaan tersebut tidak saling berkolaborasi untuk

kemajuan bersama. Akibatnya mereka yang tidak bisa bersaing akan tersingkir, dalam hal ini lapisan strata bawah komunitas pesisir.

Eksklusi sosial yang dialami oleh komunitas pesisir strata bawah tersebut membawa mereka jatuh pada kemiskinan. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih bisa melakukan aktifitas ekonomi, tetapi aktifitas tersebut tidak bisa ditujukan untuk mengakumulasi modal, melainkan sekedar untuk mempertahankan hidup. Dalam kondisi ini, sangat sulit bagi mereka untuk mengalami mobilitas vertikal. Sebab, akses pendidikan untuk anak-anak mereka saja sulit. Meskipun pemerintah memiliki program pendidikan dasar gratis, tetapi bila fasilitas pendidikan seperti gedung tidak mendukung, tetap saja anak-anak nelayan tidak bisa menikmatinya.

Harapan untuk meningkatkan taraf hidup bagi mereka saat ini ada dua. *Pertama*, mencari lapangan kerja lain selain profesi nelayan. Yang paling dekat adalah pengolah ikan, tetapi ini membutuhkan modal. Selain itu, bila mereka cukup beruntung, menjadi buruh migran juga bisa meningkatkan taraf hidup mereka secara drastis. Berdasarkan keterangan seorang responden yang berprofesi sebagai pembuat kapal, umumnya warga lokal yang mampu membeli kapal motor dengan harga kisaran Rp 40.000.000 (kapasitas kurang dari 10 ton dengan waktu jelajah seminggu) adalah mereka yang salah satu anggota keluarganya menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Harapan kedua adalah mengintervensi dinamika sosial-ekonomi dalam sektor perikanan di Palabuhanratu. Langkah ini lah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan-temuan lapangan, baik model koperasi maupun model perusahaan memiliki relevansi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dilapangan dibutuhkan berbagai penyesuaian dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, analisis situasi dengan analisis *Strength, Weakness, Oportunity* dan *Threat* serta analisis *stakeholder*, dibutuhkan untuk mengkaji potensi-potensi berikut tantangan-tantangan bagi pemberdayaan komunitas pesisir di Kecamatan Palabuhanratu.

3.3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strength/kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunity/Peluang, dan Threat/tantangan) berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.13. Analisis SWOT

Internal	Eksternal
Strength/Kekuatan 1. Kehalihan melaut 2. Keahlian mengolah hasil laut	Opportunity/Peluang 1. Potensi SDA perikanan 2. Potensi SDA Pariwisata 3. Infrastruktur Pelabuhan 4. Kelompok-Kelompok Nelayan 5. LSM Lokal
Weaknes/Kelemahan 1. Karakter Masyarakat Pasrah dan Konsumtif 2. Pendidikan Rendah 3. Individualis 4. Ketergantungan pada rentenir dan pengijon	Threat/Tantangan 1. Ancaman Tsunami 2. Potensi Polusi PLTU 3. Akses Modal Finansial&Teknologi Terbatas 4. Utang-Piutang Nelayan-Pengusaha 5. Lapangan Kerja Terbatas 6. Aktor-Aktor Opportunis 7. Arus Informasi Terbatas dan Manipulatif 8. Lemahnya kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- *Weakness/Kelemahan*

Rendahnya pendapatan keluarga perikanan membawa berbagai konsekwensi bagi mereka. Keterbatasan modal finansial membuat alokasi belanja pendapatan mereka diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, kepentingan jangka panjang seringkali diabaikan. Salah satu kepentingan jangka panjang tersebut adalah menyekolahkan anak-anak mereka. Karena itu, wajar bila sebagian besar warga yang berada di komunitas pesisir strata bawah hanya mengenyam pendidikan dasar tingkat SD.

Sayangnya, mereka tampak pasrah dengan kondisi tersebut. Sikap tersebut akan semakin menjadi apabila mereka sudah terikat ikatan utang-piutang dengan pengusaha perikanan lokal. Hubungan tersebut terkadang tidak ditanggapi dengan

negatif oleh warga, karena mereka merasa bahwa sejak lama pola hubungan utang-piutang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan pendahulu mereka.

Komunitas pesisir di Palabuhanratu juga tergolong individualis. Tidak hanya karena profesi mereka yang menghabiskan waktu lebih banyak di dermaga dan di laut, sehingga mereka kekuarangan waktu untuk bersosialisasi. Tekanan ekonomi juga membuat mereka selalu berusaha mencari peluang memperoleh keuntungan meski merugikan orang lain. Kebiasaan seperti ini sangat menyulitkan komunitas pesisir untuk membangun jaringan di luar komunitasnya atas dasar kepercayaan.

Di sisi lain, perangkat desa yang seharusnya bisa mampu mengorganisir masyarakat juga belum bekerja dengan maksimal. Sikap oportunistik perangkat desa, seperti menyelewengkan bantuan pemerintah, telah menjatuhkan kredibilitas mereka dihadapan komunitas. Sebagai akibatnya komunitas tidak terorganisir dengan baik karena kepercayaan diantara sesama anggota komunitas juga rendah.

- *Threat/Ancaman*

Berdasarkan hasil studi di lapangan, kondisi-kondisi di Palabuhanratu cukup kompleks bagi program pemberdayaan. Meskipun, kaya akan potensi sumberdaya alam serta memiliki dukungan infrastruktur yang baik, tetapi pengelolaan kinerja sektor perikanan yang tidak maksimal, serta beberapa ketimpangan relasi sosial antar aktor telah menekan komunitas pesisir. Selain itu, ada pula faktor yang sulit dikendalikan seperti bahaya tsunami.

Kinerja TPI yang tidak maksimal gagal memutus mata rantai ekonomi yang selama ini tidak adil bagi nelayan. Sebagaimana dengan yang terjadi pada komunitas pesisir pada umumnya, kelompok sosial strata bawah dalam komunitas pesisir selalu terjebak dalam utang-piutang dengan bakul/pengusaha/pengijon yang sudah terlebih dahulu 'membeli' hasil tangkap mereka dengan memberikan pinjaman modal untuk melaut.

Kendala terbesar bagi nelayan untuk mempertahankan harga adalah mereka tidak bisa menjaga kesegaran ikan tanpa peti es atau *case storage*. Karena itu, nelayan harus segera menjual ikannya sebelum harga ikan semakin jatuh. Bila TPI tidak bisa menyediakan fasilitas tersebut, menjual ikan di TPI justru akan

merugikan nelayan. Sebab proses lelang cukup memakan waktu dan dilakukan secara bergilir. Oleh karena itu, proses jual-beli ikan di Palabuhanratu sebenarnya lebih banyak terjadi di luar TPI. Yang menjual di TPI hanya nelayan-nelayan kecil yang hasil bekerja/berlayar harian, serta nilai penjualan berkisar Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000. kisaran harga tersebut juga masih mampu dijangkau oleh pengusaha atau bakul kecil.

Di sisi lain, kelangkaan lapangan kerja yang dapat diakses penduduk semakin meningkatkan ketergantungan mereka pada profesi nelayan. Namun, responden-responden dalam penelitian menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain, sebab tidak punya cukup modal atau ijazah yang bisa digunakan untuk bekerja di perantauan.

Pembangunan infrastruktur Palabuhanratu memang telah mengangkat produktifitas hasil tangkap pelabuhan. Kota Kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi ini juga semakin tertib. Akan tetapi, semua perkembangan positif tersebut tidak bisa dinikmati oleh komunitas pesisir pada strata bawah. Begitu pula dengan bantuan-bantuan yang diperuntukkan untuk mereka. Ini semua terjadi karena adanya pola interaksi sosial-ekonomi yang tidak simetris.

Upaya-upaya pemberdayaan maupun bantuan yang diberikan untuk komunitas pesisir strata bawah juga tidak berjalan dengan lancar. Ada dua faktor yang melatarbelakanginya. *Pertama*, integritas pelaksana program sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bantuan-bantuan yang disalurkan melalui perangkat desa selalu 'menguap' sebelum sampai ke warga. Kalaupun sampai, seringkali salah sasaran. Hasil survey telah menunjukkan banyaknya warga yang kecewa dengan kinerja koperasi maupun pelaksanaan program bantuan yang selama ini berjalan. *Kedua*, warga akhirnya menjadi apatis. Kepercayaan antara warga dengan institusi yang menjalankan program bantuan atau pemberdayaan begitu rendah. Tidak sedikit juga warga yang tidak mau tahu secara sengaja menyalahi prosedur bantuan maupun program pemberdayaan yang diberikan kepada mereka. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya tingkat pengembalian dana DEP program PEMP Kecamatan Palabuhanratu tahun 2001-2003 dan 2006 yang rata-rata hanya 20% saja.

- *Strenght/kekuatan*

Masyarakat Pelabuhanratu, khususnya yang berada di daerah pesisir, memiliki keahlian melaut yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhurnya. Keahlian ini merupakan potensi tersendiri yang dimiliki warga, baik disadari secara langsung maupun tidak. Dengan keahlian tersebut, sebagian besar masyarakat di Pelabuhanratu mempertahankan mata pencaharian di bidang perikanan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka tentunya mengetahui lokasi-lokasi perairan dengan potensi perikanan yang baik. Mereka memiliki keahlian dalam menyiasati keadaan laut yang tidak menentu termasuk pengaruhnya terhadap hasil tangkapan para nelayan. Pada bulan-bulan tertentu, terutama musim penghujan, beberapa jenis ikan sulit dicari. Keadaan ini mereka atasi dengan menggunakan peralatan yang berbeda-beda sesuai dengan musim untuk memperoleh jenis tangkapan yang berbeda sesuai keadaan. Dengan demikian, mereka tetap memperoleh hasil tangkapan meski sebenarnya keadaan laut tidak menguntungkan. Apabila keahlian ini didukung oleh teknologi dan peralatan yang tepat, maka hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dipastikan dapat lebih besar.

Di sisi lain, nelayan Pelabuhanratu secara tradisional memiliki keahlian untuk mengolah hasil laut yang diperolehnya. Misalnya, ikan yang telah ditangkap cukup lama dapat diolah menjadi ikan asin. Di kecamatan lain, seperti Kecamatan Surade, pembudidayaan rumput laut sudah mulai dilakukan atas inisiatif bupati setempat.

- *Opportunity / Peluang*

Temuan peneliti di Kecamatan Pelabuhanratu menunjukkan beberapa peluang (*opportunity*) yang dapat dikembangkan terkait pemberdayaan masyarakat di pesisir Pelabuhanratu. Peluang pertama berasal dari potensi sumber daya alam perikanan yang terhampar luas di jalur pantai selatan pulau Jawa ini. Dengan memiliki panjang garis pantai 117 km dan area fishing ground seluas 702 km², Kecamatan Pelabuhanratu sebagai salah satu bagian dari Kabupaten Sukabumi memang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar. Menurut perhitungan, laut Kabupaten Sukabumi menyimpan potensi tangkap lestari

(MSY/*Maximun Sustainable Yield*) sebesar 14.592 ton/tahun. Dalam setahun, tak kurang dari 9.000 ton ikan masuk ke tempat pelelangan di Pelabuhanratu. Jika dikelola dengan baik, kekayaan alam ini adalah potensi besar yang dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya.

Pantai sepanjang pesisir Pelabuhanratu juga memiliki keindahan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Potensi sumber daya alam dalam bidang pariwisata di daerah ini telah lama dikenal. Di sepanjang pantai terdapat banyak penginapan dan hotel yang berdiri. Keindahan karang-karang yang berada di daerah pariwisata Karang Hawu, menjadi salah satu tujuan pariwisata. Ombaknya yang cukup besar memungkinkan beberapa titik dapat digunakan sebagai lokasi bagi olahraga surfing. Banyak turis lokal maupun mancanegara datang ke tempat ini.

Infrastruktur pelabuhan telah lama didirikan di tempat ini. Keberadaannya telah dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI) yang layak. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh pihak pelabuhan, seperti pemasangan infrastruktur berupa *running text* yang berisi informasi yang dibutuhkan nelayan mengenai kecepatan angin, keadaan cuaca, dsb. Seandainya pengelola pelabuhan mampu menyediakan *case storage* atau tempat pendingin ikan, tentu akan sangat membantu nelayan tangkap.

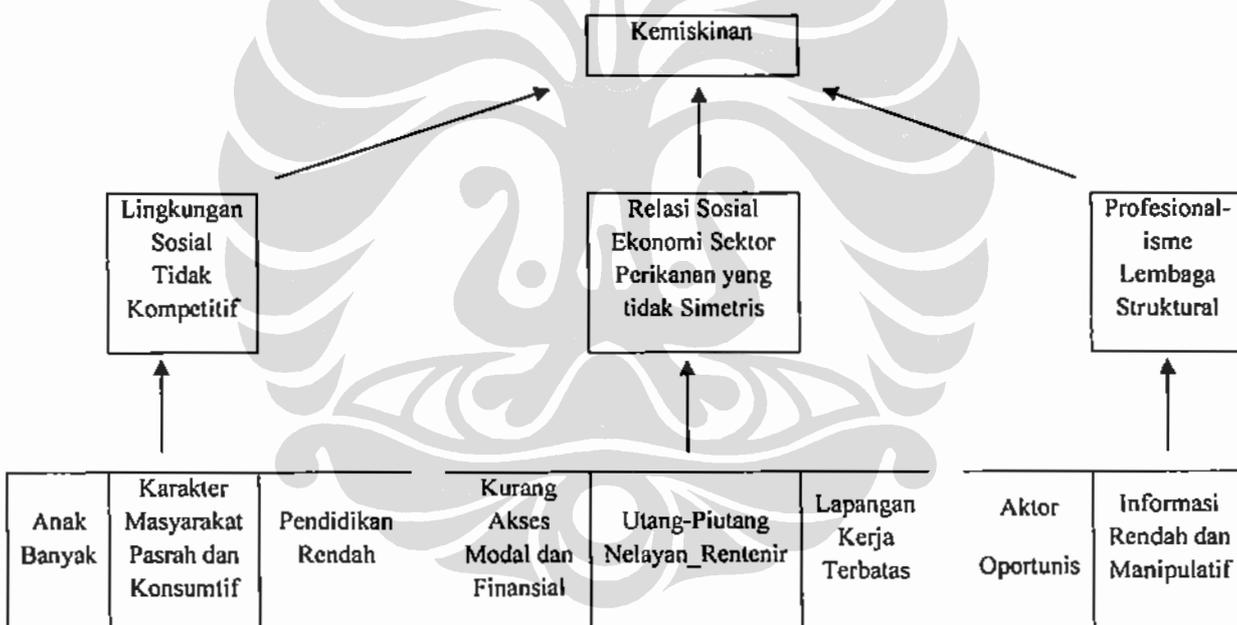
Keberadaan kelompok-kelompok nelayan mendukung penyaluran program-program pemberdayaan yang bisa dilakukan di Pelabuhanratu. Melalui kelompok-kelompok nelayan, biasanya program-program pemberdayaan disalurkan, seperti penyaluran dana DEP program PEMP, atau bantuan mesin dan alat tangkap melalui KUB oleh otoritas pelabuhan PPNP. Sayangnya tidak semua nelayan memandang kebermanfaatan kelompok-kelompok tersebut. Sebab, disiplin masing-masing anggota kelompok nelayan masih rendah.

Sejumlah LSM lokal telah berdiri di Kecamatan Pelabuhanratu. Mulai dari koperasi, yayasan sosial, hingga HNSI. Masing-masing organisasi kemasayrakan tersebut menjalankan fungsi yang tujuannya untuk membantu komunitas pesisir. Wilayah gerak organisasi tersebut juga beragam. Ada yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti koperasi LEPM2R. Ada juga yang

fokus dalam advokasi dan penyaluran aspirasi nelayan, seperti aktifitas HNSI di pelabuhan perikanan dan Yayasan Gemma di Desa Citepus.

3.3.3 Pohon Permasalahan

Analisis spesifik terhadap kendala dalam penguatan potensi di Palabuhanratu berawal dari permasalahan-permasalahan yang berada dalam tataran mikro. Kendala-kendala tersebut dihadapi oleh komunitas pesisir dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi warga dengan permasalahan tersebut, membentuk pola perilaku serta watak dari komunitas pesisir. Dalam analisis Kusnadi, disebutkan bahwa komunitas pesisir memandang sinis program-program yang ditujukan untuk mereka. Bila melihat realitas lapangan di Palabuhanratu, mereka sebenarnya bukan tidak mau menerima program tersebut, melainkan kecewa dengan pelayanan program. Terlalu banyak aktor-aktor pelaksana yang oportunistis.



Gambar 3.8. Pohon Permasalahan

Pola interaksi yang tidak simetris tersebut terjadi sebagai akibat kelemahan komunitas pesisir strata bawah dalam mengakses modal finansial dan teknologi. Mereka mau tidak mau harus menerima tawaran pinjaman dari pemilik modal, yang biasanya adalah pengusaha atau pedagang ikan. Pembayaran pinjaman

tersebut dilakukan dengan menjual hasil tangkapan kepada mereka. Umumnya pola hubungan seperti ini selalu berujung pada utang-piutang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh komunitas pesisir dalam kehidupan sehari-hari terus berulang. Akibatnya, mereka menjadi tereksklusi dari pembangunan sektor perikanan, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

3.3.4 Analisis Stakeholder

Pemangku kepentingan utama dalam model pemberdayaan adalah kelompok sasaran, dalam hal ini komunitas pesisir strata bawah, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagai stakeholder utama, aktifitas model pemberdayaan harus diarahkan untuk memperkuat posisi mereka dalam komunitas.

Pemangku kepentingan kedua adalah masyarakat pesisir lain yang berada di atas strata bawah. Mereka berperan penting untuk menjembatani atau sebagai penggerak warga.

Pemangku kepentingan ketiga adalah kalangan profesional. Mereka bisa berasal dari relawan atau penggerak di organisasi kemasayakatan, seperti LSM, koperasi, yayasan sosial, dan sebagainya. Kalangan profesional juga termasuk mereka yang memiliki latarbelakang pengusaha. Pemangku kepentingan dari kalangan pengusaha akan semakin strategis peranannya dalam model perusahaan induk.

Pemangku kepentingan keempat adalah jajaran pemerintah, terutama pemerintah lokal. Peran pemerintah sangat diharapkan, karena pemerintahlah satu-satunya institusi yang memiliki otoritas regulasi, dan yang paling layak untuk dilibatkan dalam sebuah proses rekayasa sosial.